

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Potensi tersebut tidak hanya terdapat di wilayah perkotaan, tetapi juga tersebar di berbagai daerah hingga ke desa-desa. Salah satu sektor yang memanfaatkan potensi tersebut adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi, serta berkontribusi terhadap peningkatan devisa negara. Dengan demikian, sektor pariwisata dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat (Naibaho, 2022).



**Gambar 1. 1 Data Perkembangan Jumlah Devisa Sektor Pariwisata
Indonesia Tahun 2015-2024**

Sumber: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

Berdasarkan Data tersebut Pariwisata Indonesia semakin menunjukkan signifikansinya setelah pandemi Covid-19. Meskipun sempat terpuruk akibat pembatasan mobilitas, sektor ini berhasil pulih dengan cepat. Pada tahun 2022, devisa pariwisata tercatat sebesar USD 6,78 miliar atau meningkat 40,10%

dibandingkan 2019. Tren pemulihan ini berlanjut pada 2023 dengan capaian USD 14 miliar, dan semakin menguat di tahun 2024 yang menembus angka USD 16,71 miliar, naik sekitar USD 2,71 miliar dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pariwisata tidak hanya menjadi sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi nasional, tetapi juga berperan sebagai lokomotif pembangunan yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Kendati demikian, keberhasilan pengembangan pariwisata tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah wisatawan maupun pendapatan yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana sektor pariwisata mampu memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Barereto dan Giantari (2015) menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik destinasi wisata agar mampu menarik lebih banyak wisatawan serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pembangunan daerah, pengembangan pariwisata yang efektif adalah pariwisata yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan potensi wisata. Oleh karena itu, pendekatan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) menjadi salah satu strategi yang banyak dikembangkan karena mampu mendorong partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,

Konsep pemberdayaan masyarakat menjadi elemen penting dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Menurut Kuncoro (2004), pemberdayaan tidak berarti memberikan kekuatan baru kepada masyarakat, melainkan mengoptimalkan potensi yang telah dimiliki masyarakat agar dapat

berkembang menjadi kekuatan nyata yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Dengan kata lain, pemberdayaan menekankan pada upaya membangun kesadaran, meningkatkan kemampuan, serta memperkuat kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat juga menjadi perhatian dalam pembangunan pariwisata di berbagai daerah di Indonesia. Setiap daerah berlomba untuk mengoptimalkan potensi pariwisatanya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Daerah yang mampu mengelola potensi pariwisatanya secara optimal cenderung memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan daerah maupun terbukanya peluang usaha bagi masyarakat setempat (Indrianti, 2019).



Gambar 1. 2 Data 10 Besar Provinsi yang Sering Dikunjungi Wisatawan

Sumber: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah merupakan tiga provinsi dengan jumlah kunjungan wisatawan nusantara tertinggi. Dari ketiga provinsi tersebut, Jawa Tengah menempati posisi ketiga sebagai salah satu destinasi wisata yang cukup diminati oleh wisatawan domestik. Provinsi Jawa Tengah memiliki 35

kabupaten/kota yang masing-masing memiliki potensi wisata yang beragam. Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi pariwisata cukup besar adalah Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 mencapai sekitar 4,2 juta wisatawan, jumlah tersebut melampaui target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas yaitu sebesar 3,4 juta wisatawan (Sumarwoto, 2024). Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas memiliki potensi pariwisata yang cukup besar untuk terus dikembangkan.

Dalam upaya mengoptimalkan potensi pariwisata tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas mendorong pengembangan desa wisata sebagai salah satu strategi pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Desa Wisata, dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, disebutkan bahwa pemberdayaan desa wisata bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan sekaligus memanfaatkan potensi alam. Artinya, masyarakat memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan sekaligus mengoptimalkan potensi wisata yang ada, dengan demikian keberhasilan pengembangan desa wisata, sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat yang selaras dengan regulasi tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya keterlibatan warga sebagai motor penggerak pengembangan desa wisata di Banyumas.

Salah satu desa wisata yang berkembang di Kabupaten Banyumas adalah Desa Wisata Melung yang terletak di Kecamatan Kedungbanteng. Desa ini memiliki lokasi yang strategis karena berbatasan langsung dengan Kecamatan Baturraden yang dikenal sebagai ikon wisata Banyumas. Kedekatan geografis tersebut memberikan peluang bagi Desa Melung untuk berkembang sebagai destinasi wisata alternatif sekaligus pendukung kawasan wisata Baturraden. Pada desa wisata ini menawarkan beragam jenis wisata, yaitu:

Tabel 1. 1 Destinasi Wisata Desa Melung

1	Wisata Alam	a. Wisata alam Pagubugan b. Bukit Agaran
2	Wisata edukasi	a. Pertanian Organik b. Pengamatan Burung Elang Jawa
3	Wisata religi	a. Petilasan Kyai Melung, b. Petilasan Syech Ashari, c. Bukit Cendana, d. Watu Lumpang, e. Batur Macan
4	Produk Potensi Alam	a. Kopilung b. Kerajinan dari anyaman bambu

Sumber: Dolan Banyumas

Desa Melung mulai mengembangkan desa wisatanya sejak tahun 2017, sehingga status Desa Melung sebagai Desa Wisata sudah berjalan selama 8 tahun sampai dengan tahun 2025 ini. Sejak tahun 2017, Desa Melung mulai berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengembangkan objek wisata Pagubugan, yang menjadi inisiasi berdirinya Desa Wisata Melung. Inisiatif ini menandai pergeseran fokus desa dari hanya bergantung pada sektor alam menjadi

diversifikasi ke sektor pariwisata, termasuk wisata budaya, kuliner, dan edukasi (Pribadi & Nastiti, 2023).

Pengembangan desa wisata yang berkelanjutan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat lokal dalam setiap tahapannya, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pengawasan (Mamuri & Saputra, 2020). Sayangnya, dalam banyak kasus, keterlibatan masyarakat sering kali masih minim atau diabaikan, dengan peran pemerintah yang masih sangat dominan. Hal ini menjadi tantangan utama, karena idealnya pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator, sementara masyarakat yang seharusnya menjadi subjek utama dalam pelaksanaan dan pengawasan program (Mamuri & Saputra, 2020).

Meskipun memiliki potensi wisata yang cukup besar, pengembangan Desa Wisata Melung masih menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keterlibatan dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Salah satu permasalahan yang muncul adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan desa wisata. Meskipun masyarakat telah dilibatkan dalam forum-forum diskusi atau rembug desa, sebagian masyarakat masih cenderung berperan sebagai pendengar pasif dan belum aktif dalam menyampaikan aspirasi maupun terlibat dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan tingkat pendidikan masyarakat, minimnya akses informasi, serta lemahnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengelola kegiatan pariwisata (Pribadi & Nastiti, 2023).

Permasalahan lainnya berkaitan dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lokal yang berperan dalam pengelolaan desa wisata. Pengelolaan Desa Wisata Melung melibatkan beberapa kelembagaan lokal seperti BUMDes dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Namun dalam pelaksanaannya, kelembagaan tersebut masih menghadapi keterbatasan dalam hal kemampuan manajerial, sumber daya manusia, serta dukungan pendanaan. Sebagian besar pengurus Pokdarwis merupakan masyarakat setempat yang belum memperoleh pelatihan profesional yang memadai dalam pengelolaan pariwisata (Susanto, 2024).

Permasalahan serupa juga ditemukan pada penelitian terdahulu. Penelitian Putri dan Yuningsih (2019) mengenai pengembangan Desa Wisata Wonolopo di Kota Semarang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat partisipasi semu, di mana masyarakat hanya dilibatkan dalam kegiatan tertentu namun belum memiliki peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan maupun pengelolaan desa wisata. Selain itu, penelitian Faridatul Mubarakah, Maesaroh, dan Nina Widiowati (2022) mengenai pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan kemampuan manajerial, kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan peluang pasar, serta keterbatasan modal usaha yang dimiliki masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam pengembangan desa wisata, proses pemberdayaan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi

partisipasi masyarakat maupun kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola potensi wisata yang ada. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih terarah agar masyarakat dapat berperan secara aktif sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata.

Selain itu, aktivitas pariwisata di Desa Melung juga menunjukkan adanya kecenderungan dominasi pihak luar dalam pemanfaatan peluang ekonomi pariwisata. Beberapa kegiatan pariwisata, seperti pembangunan vila dan penginapan di sekitar kawasan wisata, lebih banyak dikelola oleh investor dari luar desa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lokal belum sepenuhnya menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekonomi pariwisata, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata belum dirasakan secara merata oleh masyarakat desa (Mamuri & Saputra, 2020).

Jika kondisi ini terus berlangsung, maka pengembangan pariwisata berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi serta mengurangi partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan desa wisata. Selain itu, pemanfaatan Dana Desa di Desa Melung juga masih lebih banyak difokuskan pada pembangunan fisik, sehingga upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan masyarakat belum mendapatkan perhatian yang optimal (Budiningsih, 2019).

Kementrian Pariwisata juga mendorong pengembangan desa wisata di berbagai daerah, termasuk Desa Melung, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui survei wisatawan pada platform yang dapat diakses melalui website

<https://jadesta.kemenparekraf.go.id/>. Hasil survei wisatawan yang pernah mengunjungi Desa Melung menunjukkan bahwa beberapa fasilitas pendukung desa wisata masih belum optimal, seperti akses internet, fasilitas makanan dan minuman, fasilitas ibadah, akses jalan menuju desa wisata, serta ketersediaan sarana transportasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan dalam pengembangan fasilitas pendukung pariwisata di Desa Melung.

Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Melung tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan potensi wisata, tetapi juga sangat bergantung pada proses pemberdayaan masyarakat. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa tahapan, yaitu tahap penyadaran terhadap potensi yang dimiliki, tahap peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan, serta tahap pendayaan yang memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam mengelola kegiatan pariwisata secara mandiri. Namun, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya peran kelembagaan lokal dalam mendukung pengelolaan desa wisata.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Desa Wisata yang menekankan pentingnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan potensi wisata secara berkelanjutan. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa tahapan pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Melung masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan yang tercantum dalam regulasi dengan pelaksanaannya

di lapangan. Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Melung belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis secara lebih mendalam **Tahapan pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dalam penelitian ini terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi yaitu:

1. Minimnya Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Melung, sebagian besar masyarakat masih bersifat pasif dan jarang menyampaikan aspirasi
2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia masyarakat dikarenakan keterbatasan tingkat pendidikan masyarakat, minimnya akses informasi, serta lemahnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengelola kegiatan pariwisata.
3. Keterbatasan kapasitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan pariwisata, termasuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang sebagian besar anggotanya masih belum memperoleh pelatihan profesional.
4. Pemanfaatan Dana Desa belum sepenuhnya diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat desa wisata. Dana yang ada cenderung digunakan untuk pembangunan fisik, padahal peningkatan kapasitas masyarakat juga krusial untuk keberlanjutan desa wisata.

1.3.Rumusan Masalah

Penelitian ini setelah diuraikan perihal latar belakang dan identifikasi masalah, muncul beberapa rumusan masalah yang menjadi pedoman dalam melakukan analisis permasalahan. Berikut uraiannya:

1. Bagaimana tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas?
2. Apakah Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan Desa Wisata Melung?

1.4.Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya memiliki tujuan akhir yang hendak dicapai, tujuan tersebut terdiri dari:

1. Untuk menganalisis tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas;
2. Untuk menganalisis mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan Desa Wisata Melung.

1.5.Kegunaan Penelitian

Penelitian ini juga memiliki beberapa nilai manfaat yang hendak dicapai, yang terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, berikut uraiannya:

1. Kegunaan Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan di bidang administrasi publik terkhusus kaitannya dengan proses

pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan Desa Wisata yang dalam hal ini adalah Desa Wisata Melung dan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian sejenis di kemudian hari dan dapat menjadi pedoman bagi penelitian lainnya yang mengulas mengenai proses pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Desa Wisata.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan serta motivasi bagi masyarakat Desa Melung untuk dapat mengoptimalkan kemampuan mereka sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat demi tercapainya kemajuan Desa Wisata Melung dan tercapainya kesejahteraan masyarakat dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak Pemerintah Desa Melung untuk dapat menjalankan kewenangannya secara optimal demi terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa untuk pengembangan Desa Wisata Melung.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Hasil Penelitian	Kontribusi Terhadap Penelitian
1	Suraji, Ruli Sumual, Piet Pusung, et al (2021)	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Urongo Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata	Menggunakan teori Ambar Teguh Sulistiyani	Hasil penelitian dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Urongo terdapat adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam pemberdayaan masyarakat, upaya yang cukup baik adalah kemitraan dan bantuan	Memberikan gambaran tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata
2	Wibawanti, Fadhiya, Utami, Muhammad Fauzi,		Mengetahui upaya pemberdayaan masyarakat melalui	Burhanuddin et al. (2018) inisiasi penumbuhan usaha	Pemberdayaan masyarakat Desa Tersidlor melalui pemanfaatan hasil samping pertanian berupa	Menguatkan citra Desa Wisata Melung sebagai desa yang tidak hanya menawarkan wisata alam, tetapi juga wisata

	Nurul Fauziah Hermawati, (2024) Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Bekatul Sebagai Pangan	pengolahan bekatul sebagai pangan fungsional	ekonomi merupakan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan khususnya bagi keluarga yang prasejahtera.	bekatul menjadi berbagai produk pangan seperti kukis bekatul, akar kelapa yang bermanfaat bagi kesehatan	edukasi berbasis pangan fungsional dan memberikan bukti bahwa pemberdayaan dapat berjalan dengan menggabungkan aspek <i>local wisdom</i> dengan inovasi modern.
3	Parmin, Ani Rusilowati, Endah Fitriani Rahayu (2022) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Tanaman Obat untuk Menunjang Penyediaan Bahan Baku Produksi Jamu Tradisional	Untuk memberdayakan masyarakat melalui konservasi tanaman obat yang merupakan keunggulan lokal desa.	Pengetahuan masyarakat sasaran tentang teknik menanam, merawat, memanen, dan mengolah hasil budidaya tanaman obat diperoleh setelah sosialisasi dan pendampingan dilakukan tim pengabdian. Pengetahuan	Hasil kegiatan ditemukan ada lima jenis tanaman obat unggulan desa. Masyarakat terlibat secara aktif mulai dari menyiapkan lahan, menanam, merawat, dan mengolah menjadi jamu tradisional.	Menunjukkan keterkaitan antara pelestarian lingkungan, kearifan lokal, dan pengembangan ekonomi desa wisata dan memberikan perspektif bahwa pemberdayaan tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara ekologi dan budaya.

			masyarakat tentang objek pemberdayaan sangat dibutuhkan agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam pemberdayaan desa (Susilo et al., 2018; Hariawan, & Tatisina, 2020).		
4	Encep Andriana, Rina Yuliana, Wardatul Ilmiah, Callista Aulina, Tri Esti Noviyanti, Suci Ramadayanti (2022) Pemberdayaan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal.	Mengetahui pemberdayaan ekowisata berbasis kearifan lokal,	Mastika (2018) yang melakukan penerapan industri kreatif berupa pemanfaatan metode pertanian organik sebagai daya tarik ekowisata yang didukung oleh daya tarik wisata alam dan wisata budaya lain dengan paket	Hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan pengabdian ini yaitu meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengembangan ekowisata.	Memberikan dasar analisis bahwa pengembangan desa wisata harus berpijak pada nilai budaya, tradisi, dan praktik lokal.

			wisata sebagai berikut: 1) Jamu tradisional dan kuliner organik; 2) Lokal home stay; 3) Plant adoption; 4) Field and Village Tracking; 5) Tubbing attractions; dan 6) Edukasi pertanian organik		
5	Fitra Ayuningtyas Hidayatullah dan Tri Suminar (2021) Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Candi Plaosan melalui Program Desa Wisata untuk Kemandirian Ekonomi di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten	Bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pemberdayaan, faktor pendukung dan penghambat, serta keberhasilan pemberdayaan berbasis potensi lokal.	andasan teorinya mencakup konsep pemberdayaan menurut Mardikanto, Sumodiningrat, dan Sulistiyan yang menekankan pengembangan SDM, kelembagaan, usaha produktif,	Hasil penelitian bahwa pemberdayaan dilakukan melalui lima strategi inti pengembangan SDM, kelembagaan (BUMDes & Pokdarwis), usaha produktif, modal sosial ekonomi, dan informasi serta pelaksanaan melalui tiga tahap pemberdayaan hingga masyarakat dapat lebih mandiri.	Kontribusi penting penelitian ini terhadap penelitian Anda di Desa Wisata Melung terletak pada kesamaan fokus desa wisata berbasis potensi lokal dan peran kelembagaan (Pokdarwis/kelembagaan desa) dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat menjadi pembanding konsep maupun implementasi pemberdayaan.

			pemupukan modal, serta penyediaan informasi; serta teori pelaksanaan pemberdayaan melalui tahap penyadaran, transformasi, dan pengayaan.		
6	Mustangin, Desy Kusniawati, Nufa Pramina Islami, Baruna Setyaningrum, dan Eni (2020) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji.	Mengetahui . bentuk-bentuk aksi pemberdayaan masyarakat, proses partisipasi masyarakat, dan dampak pengembangan desa wisata terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.	konsep pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Payne, Anwas, Robbins, dan Kartasasmita.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Bumiaji berhasil dilaksanakan melalui pengembangan potensi lokal berupa perkebunan apel, atraksi budaya, dan produk olahan apel. Masyarakat terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, mulai dari penyediaan homestay, wisata petik apel, hingga pembentukan UMKM dan kelompok seni.	Temuan-temuan di Desa Bumiaji dapat menjadi rujukan empiris untuk melihat bagaimana potensi lokal dapat dioptimalkan melalui desa wisata dan bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara terstruktur melalui pembentukan kelembagaan, pendampingan, dan partisipasi warga
7	Ummi Mufidah Maudina, (2023), Pemberdayaan	Mendeskripsikan tahapan serta faktor pendukung dan	Teori pemberdayaan masyarakat	Hasil penelitian menemukan bahwa proses pemberdayaan diawali dengan tahap penyadaran dan	Menjadi kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana pemberdayaan masyarakat di

	Masyarakat Melalui Program Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal di Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus	penghambat pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata berbasis potensi lokal		pembentukan perilaku melalui sosialisasi dan pengenalan	Desa Wisata Melung berjalan efektif..
8	Putri, Tri Yuningsih (2019) Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan n desa wisata wonolopo.	Teori Midgley	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Wonolopo dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo masih berbentuk partisipasi semu, sedangkan tingkat partisipasi masyarakat Wonolopo dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo ini sudah berada pada tingkat tertinggi yaitu citizen power atau kekuatan dari masyarakat.	Menjadi acuan dalam menilai apakah tingkat partisipasi masyarakat mempengaruhi dalam proses pemberdayaan masyarakat desa wisata.
9	Ellyn Normelani, (2023), <i>Community Empowerment in Tourism Village Areas: Efforts to</i>	Mengetahui keberlanjutan kegiatan pariwisata di desa melalui program pemberdayaan	Teori <i>Human Resource Capital</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pertama yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat adalah modal fisik dan modal sosial,	Menunjukkan bahwa keberhasilan desa wisata tidak hanya dilihat dari peningkatan pengunjung, tetapi dari

	<i>Maintain the Sustainability of Tourism Activities, Journal of Environmental Management and Tourism.</i>	masyarakat.			keberlanjutan program pemberdayaan.
10	A. Faidlal Rahman, Made Budiarsa, Indayati Lanya, I. Made Adikampana, Tomi Agfianto (2023), <i>Community Empowerment in The Promotion to Support The Development of The Tourism Village in Batu, Indonesia.</i>	Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat di bidang promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu untuk mendukung pengembangan desa wisata.	Teori Pemberdayaan Masyarakat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam promosi desa wisata dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu berupa penyelenggaraan pelatihan promosi desa wisata berbasis digital, memfasilitasi pembuatan materi promosi desa wisata, dan pemberian kesempatan kepada masyarakat (pengelola desa wisata) untuk mengikuti forum usaha pariwisata.	Memberikan inspirasi strategi bagi Desa Wisata Melung untuk memaksimalkan promosi berbasis kolaborasi dengan pemerintah, media, dan komunitas.
11	Nadia Nur Fitriani, Aufarul Marom, (2025) Analisis Proses Pemberdayaan	Mengetahui proses pemberdayaan masyarakat desa wisata banjarpanepen	Menurut Dwidjowiyoto dan Wrihatnolo (2007), tahapan dalam	Proses pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Banjarpanepen telah dilaksanakan melalui tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan, meskipun belum	Menjadi studi perbandingan yang relevan karena sama-sama di wilayah Banyumas dan memberikan gambaran model pemberdayaan masyarakat

	Masyarakat Desa Wisata Banjarpanepen Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas	kecamatan sumpiuh kabupaten banyumas,	pemberdayaan masyarakat	sepenuhnya optimal dalam setiap aspeknya.	yang bisa dijadikan tolok ukur bagi Desa Wisata Melung.
12	Adela Sanmutiane, Retna Hanani, R Slamet Santoso (2024) Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tahap-tahap pemberdayaan yang dilakukan di Desa Wisata Wonolopo serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.	Menggunakan Teori tahapan pemberdayaan masyarakat	hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Wonolopo belum optimal. Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Wonolopo meliputi sumber daya manusia, kelembagaan, sarana prasarana, dan persaingan pasar.	Memberikan gambaran tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata
13	Wandira Naibaho, Herbasuki Nurcahyanto, AUFAROL MAROM (2023)	Bagaimana upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Kandri di	Mrnggunakan teori Mardikanto yaitu 1. Bina kemanusiaan 2. Bina Usaha 3.	Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Kandri secara garis besar telah memenuhi keempat upaya pemberdayaan dengan Bina Usaha	Memberikan kontribusi pada bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat

	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.	Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	Bina Lingkungan 4. Bina Lembaga	yang paling mendominasi. Pemberdayaan masyarakat juga telah membawa dampak yang positif pada peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Wisata Kandri.	melalui pengembangan desa wisata.
14	Faridatul mubarakah, Maesaroh, Nina widiowati (2022) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan.	Menggunakan teori Dimensi menurut Wrihatnolo dan dwijowijoto	Aspek yang belum sesuai dengan harapan yaitu kontrol dan kesejahteraan pada aspek pendapatan dan ketenagakerjaan. Permasalahan kurang personal branding terhadap desa wisata ini berimbas pada kesejahteraan yaitu aspek pendapatan dan aspek ketenagakerjaan. Faktor pendorong pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo yaitu sumber daya alam, sarana dan prasarana serta adanya kebijakan yang mendorong. Sementara itu, faktor penghambat pemberdayaan yaitu keterbatasan kemampuan manajerial, tidak adanya	Menjadi contoh pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata dan apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat .

				kemampuan mengelola peluang pasar yang ada dan terbatasnya modal usaha yang dimiliki.	
15	Purnomo, S., Rahayu, E. S. (2020) Empowerment Model for Sustainable Tourism Village in an Emerging Country.	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan desa wisata berkelanjutan di Indonesia	Penelitian Ini menggunakan beberapa teori yaitu pemberdayaan masyarakat, pariwisata berkelanjutan, model helix kolaboratif, dan social exchange theory untuk menjelaskan keberhasilan pengembangan Desa Wisata Ponggok.	Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata Desa Ponggok dilakukan melalui empat pendekatan: spasial, sektoral melalui BUMDes, penguatan SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi. Keempat pendekatan ini berhasil karena didukung oleh kepemimpinan yang kuat, inovasi, kolaborasi, serta tata kelola desa yang baik.	Menunjukkan bagaimana pemberdayaan Masyarakat di desa dapat berjalan dengan efektif jika adanya lembaga yang mendukung dan kepemimpinan yang kuat

Sumber: Jurnal yang diolah peneliti, (2025)

Suraji et al., (2021) mengani Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Urongo Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Urongo serta mengetahui berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat yang cukup optimal yaitu kemitraan dan bantuan pendampingan. Upaya yang belum optimal yaitu belum menerima bantuan PNPM Mandiri Pariwisata, terbatasnya pembangunan sarana dan prasarana dan belum adanya Pokdarwis dan Pengelola Desa Wisata.

Jeki Mediantari Wahyu Wibawanti et al., (2024), dengan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengolahan bekatul sebagai pangan fungsional. Penelitian ini menggunakan teori Burhanuddin (2018). Hasil riset ini menunjukkan pemberdayaan masyarakat Desa Tersidilor melalui pemanfaatan hasil samping pertanian berupa bekatul menjadi berbagai produk pangan seperti kukis bekatul, akar kelapa yang bermanfaat bagi Kesehatan.

Parmin et al., (2022) membahas mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Tanaman obat untuk Menunjang Penyediaan Bahan Baku Produksi Jamu Tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui konservasi tanaman obat, penelitian ini menekankan pentingnya pemanfaatan potensi lokal berbasis kearifan tradisi yang tidak hanya menjaga kelestarian sumber daya alam, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya lima jenis tanaman obat unggulan desa yang dibudidayakan

secara intensif. Masyarakat setempat terlibat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari menyiapkan lahan, menanam, merawat, hingga mengolah hasil panen menjadi produk jamu tradisional siap konsumsi.

Encep Andriana, et al., (2022) dengan penelitian Pemberdayaan Ekowisata berbasis Kearifan Lokal membahas pentingnya pemanfaatan potensi alam dan budaya lokal secara berkelanjutan melalui konsep ekowisata yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga pelestarian lingkungan serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Hasil riset menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian dan pemberdayaan yang dilakukan berhasil meningkatkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengembangan ekowisata.

Fitra Ayuningtyas Hidayatullah dan Tri Suminar (2021) dengan penelitian Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Candi Plaosan melalui Program Desa Wisata untuk, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pemberdayaan, faktor pendukung dan penghambat, serta keberhasilan pemberdayaan berbasis potensi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan dilakukan melalui lima strategi inti pengembangan SDM, kelembagaan (BUMDes & Pokdarwis), usaha produktif, modal sosial ekonomi, dan informasi serta pelaksanaan melalui tiga tahap pemberdayaan hingga masyarakat dapat lebih mandiri.

Mustangin et al., (2020) dengan judul penelitian Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal melalui program desa wisata Bumiaji. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk aksi pemberdayaan masyarakat, proses partisipasi masyarakat, dan dampak pengembangan desa wisata

terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan ekonomi, partisipasi, dan kemandirian warga melalui program desa wisata.

Umami Mufidah Maudina (2023) dengan judul penelitian Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal di Desa Kajar Penelitian ini bertujuan mengetahui tahapan dan faktor yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Wisata. Penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan program desa wisata tidak hanya bergantung pada potensi alam atau budaya yang dimiliki, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi tersebut secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat diawali dengan tahap penyadaran dan pembentukan perilaku melalui kegiatan sosialisasi dan pengenalan program. Hasil penelitian menunjukkan proses pemberdayaan diawali dengan tahap penyadaran dan pembentukan perilaku melalui sosialisasi dan pengenalan

Nadia Isnaini Putri dan Tri Yuningsih (2019) dengan judul penelitian Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Penelitian ini menemukan bahwa secara umum partisipasi masyarakat di Kelurahan Wonolopo masih tergolong partisipasi semu, yaitu masyarakat terlibat namun belum sepenuhnya memiliki kendali dalam proses pengembangan desa wisata. Meskipun demikian, jika dilihat dari tingkat partisipasinya, masyarakat justru telah berada pada level tertinggi menurut Midgley,

yaitu *citizen power*, di mana masyarakat memiliki kekuatan atau pengaruh besar dalam keputusan dan arah pengembangan Desa Wisata Wonolopo..

Ellyn Normelani (2023) membahas mengenai keberlanjutan kegiatan pariwisata di desa melalui program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menyoroti bahwa keberhasilan pariwisata pedesaan tidak hanya ditentukan oleh potensi destinasi wisata yang dimiliki, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat setempat diberdayakan untuk mengelola, menjaga, dan mengembangkan potensi tersebut secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan faktor pertama yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat adalah modal fisik dan modal sosial,

A. Faidlal Rahman et al., (2023) dengan penelitian Pemberdayaan Masyarakat di bidang promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu untuk mendukung pengembangan desa wisata. Hasil riset menunjukkan pemberdayaan masyarakat dalam promosi desa wisata dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu berupa penyelenggaraan pelatihan promosi desa wisata berbasis digital, memfasilitasi pembuatan materi promosi desa wisata, dan pemberian kesempatan kepada masyarakat (pengelola desa wisata) untuk mengikuti forum usaha pariwisata.

Nadia Nur Fitriani, Aufarul Marom (2025) deanga judul Penelitian Proses Pemberdayaan Masyarakat desa wisata banjarpanepen kecamatan sumpiuh kabupaten banyumas. Hasil penelitian menunjukkan proses pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Banjarpanepen telah dilaksanakan melalui tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan, meskipun belum sepenuhnya optimal dalam setiap aspeknya.

Adela Sanmutiane, Retna Hanani, dan R. Slamet Santoso (2024) mengenai Tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata serta mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya mengatasinya di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Wonolopo belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, yaitu keterbatasan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan yang belum kuat, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta adanya persaingan pasar dalam sektor pariwisata. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun desa wisata telah dikembangkan, proses pemberdayaan masyarakat masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi agar masyarakat dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

Wandira Naibaho, Herbasuki Nurcahyanto, dan Aufarol Marom (2023) dengan judul penelitian Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Kandri di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Hasil riset menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Kandri secara umum telah memenuhi keempat aspek pemberdayaan tersebut. Namun, aspek yang paling dominan dalam pelaksanaannya adalah bina usaha. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata tidak hanya berfungsi sebagai

destinasi wisata, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Faridatul Mubarakah, Maesarih, dan Nina Widiowati (2022) dengan Judul penelitian Pemberdayaan Masyarakat melalui Desa Wisata di Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan, hal ini terlihat dari dimensi kontrol dan kesejahteraan yang masih rendah, terutama pada aspek pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya personal branding desa wisata sehingga potensi wisata yang ada belum dikenal secara luas oleh masyarakat luar. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata tidak hanya bergantung pada potensi alam, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mempromosikan potensi tersebut secara efektif.

Purnomo dan Rahayu (2020) dengan Penelitian Model Pemberdayaan Masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata berkelanjutan di Indonesia dengan menggunakan teori pemberdayaan, pariwisata berkelanjutan, model helix kolaboratif, dan social exchange theory. Melalui metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa pengembangan Desa Wisata Ponggok dilakukan melalui empat pendekatan utama, yaitu pendekatan spasial, sektoral melalui BUMDes, penguatan SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi. Keberhasilan keempat pendekatan tersebut ditopang oleh kepemimpinan yang kuat, inovasi, kolaborasi, dan tata kelola desa yang baik, sehingga menunjukkan bahwa

pemberdayaan masyarakat akan efektif apabila didukung oleh lembaga yang solid dan kepemimpinan yang berorientasi pada perubahan.

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa uraian penelitian terdahulu pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa berbagai penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat telah dilakukan dengan fokus yang beragam dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Seluruh penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berorientasi pada peningkatan kapasitas, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Persamaan yang dapat ditarik dari penelitian-penelitian terdahulu adalah adanya keterlibatan aktif masyarakat, dukungan lembaga pemerintah maupun pihak terkait, serta tujuan yang sama yaitu peningkatan kesejahteraan dan kemandirian. Namun demikian, perbedaannya terletak pada bidang pemberdayaan yang berfokus pada sektor tertentu, misalnya ekonomi, kesehatan, lingkungan, atau energi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena lebih menekankan pada analisis tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Fokus penelitian bukan hanya pada hasil akhir berupa peningkatan kesejahteraan, tetapi juga pada proses yang dilalui masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dalam mengembangkan desa wisata berbasis potensi lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata,

sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan desa wisata lain di Indonesia.

1.6.2 Administrasi Publik

1. Pengertian

Kata administrasi publik adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*public administration*” yang sering disebut sebagai administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Menurut Indradi, administrasi publik merupakan proses di mana sumber daya dan juga personil publik saling dikoordinasikan dan diformulasikan serta diimplementasikan untuk mengelola keputusan kebijakan publik (Indradi, 2016).

Starling dalam Indradi (2016), menjelaskan bahwa administrasi publik adalah semua yang dicapai pemerintah, yaitu dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagaimana dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan. Menurut Rosenbloom dalam Indradi (2016), menjelaskan administrasi publik, yaitu “*is the use of managerial, legal and political*”. Merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian (Indradi, 2016).

Berdasarkan uraian mengenai pengertian administrasi publik menurut para ahli tersebut dapat diartikan bahwa administrasi publik merupakan proses kerjasama guna memformulasikan dan menjalankan kebijakan tertentu demi tercapainya tujuan baik untuk kepentingan pemerintah maupun kepentingan publik. Hal ini dapat dikaitkan dengan penelitian ini, di mana

pada penelitian ini memiliki permasalahan mengenai proses pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Melung sebagai bagian pengembangan desa. Proses ini di dalamnya terdapat kerja sama untuk memformulasikan dan menjalankan pemberdayaan masyarakat demi tercapainya tujuan yaitu mengembangkan desa.

2. Paradigma Administrasi Publik

Perubahan paradigma merupakan indikator dari adanya pertumbuhan dan perkembangan suatu ilmu. Paradigma merupakan cara pandang untuk memaknai suatu situasi atau kondisi dari individu (Kriyantono, 2024). Nicholas Henry berpendapat bahwa pada ilmu administrasi publik, harus terdapat fokus dan lokus di dalamnya. Fokus berkaitan dengan pendekatan fundamental guna mengisi permasalahan, lokus merupakan tempat atau lingkungan di mana pendekatan dilaksanakan. Henry juga menguraikan mengenai 6 jenis paradigma dalam administrasi publik, yaitu: (Henry, 1995)

a. Paradigma 1: Dikotomi politik dan administrasi

Pada paradigma ini memiliki pandangan bahwa otoritas pemerintahan dibagi menjadi dua jenis yaitu politik dan administrasi. Administrasi publik memiliki fokus terkait dengan isu atau permasalahan anggaran dan kepegawaian dalam birokrasi pemerintahan, sedangkan politik memiliki fokus pada isu politik, pemerintahan, dan kebijakan. Permasalahan di mana administrasi publik harusnya berada merupakan lokus dari paradigma ini.

b. Paradigma 2: Prinsip Administrasi

Gulick & Urwick berpendapat bahwa prinsip memiliki arti dan kedudukan yang penting dalam ilmu administrasi. Perencanaan, Organisasi, Kepegawaian, Pengarahan, Pelaporan, dan Penganggaran (POSDCORB) merupakan prinsip administrasi terkenal yang dikembangkan oleh Gulick & Urwick.

c. Paradigma 3: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik

Pada paradigma ini, terdapat upaya untuk menghubungkan secara konseptual mengenai ilmu politik dan administrasi publik. Konsekuensi yang terjadi kemudian adalah perlunya untuk merancang bidang administrasi publik, setidaknya dalam bidang keahlian utamanya. Dalam paradigma ini terdapat 2 perkembangan yang signifikan, yaitu yang pertama mengenai penerapan *case study* yang luas sebagai bagian strategi pembelajaran dan yang kedua ditetapkannya studi banding dan pengembangan administrasi dalam sub bidang ilmu administrasi.

d. Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Manajemen

Setelah diuraikan paradigma hingga bagian ketika, belum terlihat bukti mengenai adanya konsolidasi antara administrasi publik dengan ilmu politik. Kedua disiplin ilmu yang bersaing untuk mendapatkan jiwa administrasi publik hampir tidak mengubah lokus serta fokus untuk mengakomodasi ilmu-ilmu baru dan topik studi yang diselidiki oleh para akademisi perintis.

e. Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik

Dalam model ini diperjelas kembali mengenai fokus dan lokus administrasi publik, yaitu teori organisasi, ilmu kebijakan, serta ekonomi politik. Sementara isu mengenai kepentingan masyarakat menjadi lokus perhatian. Pada titik ini terdapat usaha untuk menjadikan kembali disiplin ilmu sebagai bidang studi yang berdiri sendiri. Pada paradigma ini, birokrasi berubah menjadi pasar dan sektor swasta, sedangkan fokus utama ada pada hierarki. Paradigma administrasi publik tradisional digantikan oleh pendekatan NPM. Paradigma ini dikembangkan karena menjadi landasan untuk mengatasi permasalahan inefisiensi sistem administrasi.

f. Paradigma 6: *Governance*

Paradigma ini memberi garis bawah mengenai bagaimana semua paradigma sebelumnya memiliki kecenderungan terhadap orientasi pemerintahan, sementara peran sektor swasta dan masyarakat sama sekali diabaikan sebab administrasi publik seluruhnya berpusat pada pemerintahan. Paradigma *governance* ini lebih memberikan penekanan mengenai pentingnya kolaborasi dan kesetaraan antara ketiga sektor, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian dari beberapa paradigma administrasi publik tersebut, penelitian ini termasuk pada paradigma *governance*. Hal tersebut didasarkan pada fokus penelitian yang meneliti mengenai pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Melung. Seperti yang diketahui bersama, bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki indikasi bahwa di dalamnya ada peran atau keterlibatan dari sektor lainnya untuk menyelenggarakan penyelesaian

terhadap permasalahan publik. Adanya keterlibatan pihak lain selain pemerintahan dalam suatu persoalan publik erat kaitannya dengan paradigma governance karena mencerminkan adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah.

1.6.3 Manajemen Publik

1. Definisi dan Konsep

Manajemen publik merupakan konsep yang berasal dari dua istilah yaitu “manajemen” dan “publik”. Stoner et al (1996) berpendapat bahwa manajemen adalah proses pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap aktivitas individu dalam suatu organisasi, termasuk alokasi dan pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Publik lebih mengacu kepada masyarakat yang ada pada suatu pemerintahan dan berkepentingan terhadap urusan publik. Sehingga istilah manajemen publik dapat diartikan sebagai seni dan juga ilmu yang saling berkesinambungan secara sistematis, logis, dan metodis untuk mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk memberikan keuntungan pada pihak tertentu (Anggono, 2021).

Manajemen publik memiliki ciri, yaitu terdapat proses sistematis yang dilakukan organisasi publik guna tercapainya kinerja yang efektif dan juga efisien untuk mewujudkan tujuan dari organisasi. Proses ini diawali dengan adanya kolaborasi yang diperlukan adanya partisipasi dari seluruh pihak terkait. Hal ini ditekankan pada pemberian layanan prima namun tetap

berpegang pada fungsi manajemen, dengan tujuan untuk mencapai kepuasan dari masyarakat umum (Suprayitno, 2024)

2. Fungsi Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan bagian dari domain administrasi publik yang diterapkan untuk menciptakan efektivitas pelaksanaan aktivitas organisasi dalam pencapaian sasarannya. Supaya pelaksanaannya dapat lebih efektif, fungsi manajemen publik dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Perencanaan

Fungsi ini penting untuk membuat suatu rencana, tahapan dan juga strategi yang cenderung paling tepat untuk mengembangkan organisasi karena fungsi ini dapat menentukan dan merencanakan cara dari suatu kegiatan akan berjalan sesuai dengan tujuan awal organisasi. Peran ini memiliki fungsi untuk menerapkan seberapa baik manajemen diterapkan pada sebuah perusahaan.

b. Pengorganisasian

Fungsi ini melibatkan identifikasi peran dan tanggung jawab yang tepat bagi sumber daya manusia organisasi guna memberikan tempat yang sesuai bagi orang-orang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dan juga memfasilitasi keberhasilan penerapan program manajemen organisasi.

c. Pengarahan

Pengarahan memiliki tujuan untuk memberikan kemungkinan bagi anggota untuk melakukan tugas yang telah

diberikan kepada mereka secara efektif dan efisien sehingga ketika tugas diselesaikan sesuai keinginan, pencapaian tujuan akan menjadi sederhana.

d. Koordinasi

Dalam organisasi di mana setiap individunya memiliki beragam latar belakang, menemukan titik temu dalam pandangan dan tujuan bersama. Adanya upaya memupuk persamaan ini sekaligus memungkinkan organisasi untuk berkolaborasi secara efektif dalam menyelesaikan permasalahan.

e. *Controlling*

Pengawasan dan pengendalian yang efektif penting untuk dilaksanakan karena untuk melakukan penilaian apakah program telah berfungsi sesuai dengan yang direncanakan, telah mendekati tujuannya, atau memerlukan evaluasi dan juga peningkatan.

1.6.4 Pemberdayaan Masyarakat

1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata “*empowerment*”. Menurut Mernam Webster dan *Oxford English Dictionary* kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: 1) *to give power* atau *authority* atau memberi kekuasaan, mengalihkan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, 2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberikan kemampuan. Dalam pengertian kedua kata tersebut, pemberdayaan diartikan memberi kemampuan atau keberdayaan kepada pihak lain yang tidak berdaya (Qadisyah et al., 2023). Menurut (Evita Bela et al.,

2023) bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga pemberdayaan merupakan Upaya untuk membangun potensi, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya

Kata *empowerment* berasal dari kata dasar *empower* yang berarti *to invest with power, especially legal power or official authority* atau *to equip or supply with an ability*. Jadi pemberdayaan diartikan menguasai, memberikan kuasa atau memberi wewenang sehingga menjadi obyek yang berkuasa. Dalam pemberdayaan terjadi proses yang mendorong dan meyakinkan masyarakat untuk memperoleh keterampilan, kemampuan dan kreativitas.

Hulme et al (2015) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Dari beberapa pengertian diatas dapat dirangkum bahwa pemberdayaan adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada masyarakat untuk memperoleh keterampilan, kreativitas, kekuatan untuk mendorong suatu proses perubahan sosial kepada masyarakat yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh terhadap arena politik (Miftachul Huda, 2012).

Menurut Psoinos dan Smithson dalam Greasley (2005) pemberdayaan adalah sebuah persepsi dan keyakinan, sebuah posisi yang dimiliki oleh peneliti yang mengambil perspektif pengalaman pada arti

pemberdayaan. Pemberdayaan diyakini dapat memberikan daya dan kekuatan kepada masyarakat yang lemah dalam masyarakat untuk menimbulkan rasa percaya diri dan pengalaman masyarakat dalam mengatasi permasalahan.

Begitu juga Suparjan dan Hempri Suyatno (2003) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang tidak dapat diukur secara matematis, apalagi dengan sebuah batasan waktu dan dana. Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilihat dengan adanya kesadaran masyarakat (*community awareness*). Diharapkan dengan adanya kesadaran komunitas ini dapat mengubah pemberdayaan yang bersifat penguasaan menjadi bentuk kemitraan serta meminamilisir terbentuknya solidaritas komunal semu pada masyarakat(Liswanda et al., 2025).

Terhadap beberapa uraian mengenai pengertian dari pemberdayaan masyarakat tersebut dapat diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memandirikan masyarakat dengan memberikan kemampuan, keterampilan dan kreativitas dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.

2. Proses dan Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan pembangunan alternatif yang cenderung memfokuskan diri pada partisipasi masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat tiga komponen di dalamnya, yaitu *enabling*, *empowering* dan *protecting*. *Enabling* berkaitan dengan

upaya untuk membentuk lingkungan yang dapat menginspirasi, mendorong dan meningkatkan pemahaman perihal pemanfaatan sumber daya agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Empowering merujuk pada peningkatan kapasitas melalui penguatan potensi untuk menciptakan peluang dan memberikan berbagai inputan yang berkaitan dengan keadaan pasar. *Protecting* terkait dengan perlindungan kepentingan yang dilakukan melalui pembuatan sistem yang memiliki tujuan untuk menghentikan persaingan tidak sehat dan metode bisnis yang menyimpang untuk memberikan perlindungan pada masyarakat (Suaib, 2023).

Mardi dalam (Sugianto, 2021), menguraikan bahwa program pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan dalam berbagai kegiatan, yaitu:

a. Dukungan Finansial

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat hal yang sangat penting adalah terkait dengan bantuan modal, dengan adanya modal dapat memberikan kelancaran pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

b. Dukungan Pembangunan Infrastruktur

Bantuan pembangunan infrastruktur merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kelancaran pada operasional sehari-hari.

c. Dukungan Pendampingan

Peran dari dukungan pendampingan adalah sebagai mediator dalam masyarakat sekaligus sebagai bagian pendorong untuk pembelajaran atau instropeksi.

d. Penguatan Kelembagaan

Membantu masyarakat dan memberikan kemudahan dalam mendapatkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan seperti dana, media musyawarah dan sebagainya.

e. Memperkuat Kemitraan

Gagasan ini memiliki fokus pada kemitraan yang diperkuat kedudukannya oleh kedua pihak. Pertumbuhan besar hanya akan terjadi apabila terdapat kemitraan dalam skala kecil hingga menengah. Pertumbuhan yang signifikan dapat terjadi ketika terdapat kerja sama antara berbagai ukuran atau tingkatan entitas ekonomi, baik itu dalam skala kecil, menengah, hingga besar.

Menurut Dwidjowiyoto dan Wrihatnolo (2007), tahapan dalam pemberdayaan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Penyadaran

Pada tahapan ini, subyek pemberdayaan, yaitu masyarakat diberikan pemahaman bahwa masyarakat ini memiliki potensi dan juga memiliki hak untuk mengembangkan diri. Masyarakat juga diberikan motivasi untuk mulai mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga dapat menciptakan lingkungan yang dapat memberikan dukungan untuk kemajuan potensi masyarakat. Tahapan kesadaran ini meliputi pemberian

penyuluhan kepada masyarakat kaitannya dengan pemberian edukasi. Hal ini dilakukan dengan diawali proses perekrutan peserta.

b. Tahap Pengkapasitasan

Penguatan kapasitas dilakukan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat baik secara individu ataupun kelompok, supaya masyarakat memiliki keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan peluang yang tersedia. Tahap ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti lokakarya, pelatihan, dan kegiatan serupa lainnya yang bertujuan untuk mengoptimalkan keterampilan hidup masyarakat.

c. Tahap Pendayaan

Masyarakat diberikan kesempatan yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dengan partisipasi aktif dan berkelanjutan. Proses pemberdayaan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan peran yang semakin besar kepada masyarakat yang dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas mereka, serta mengakomodasi aspirasi mereka. Masyarakat juga dituntun untuk melakukan evaluasi diri berkaitan dengan pilihan dan juga hasil pelaksanaan dari pilihan tersebut.

3. Faktor – Faktor yang Terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam proses pemberdayaan masyarakat terdapat berbagai aspek yang saling berkaitan dan menentukan keberhasilan program, unsur-unsur tersebut tidak hanya menjadi pendorong, tetapi juga dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai

faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat menjadi penting agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran. Menurut Mardikanto (2013:188), faktor-faktor yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan potensi penting yang dimiliki setiap wilayah dan dapat dijadikan modal utama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah membuka peluang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada, melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan dapat menyejahterakan hidup masyarakat setempat. Pemberdayaan lokal dapat tercapai dengan memberikan akses dan kontrol kepada masyarakat atas sumber daya alam di wilayah mereka, sehingga mampu berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan yang mendukung pembangunan yang lebih baik

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah kunci penting dalam pemberdayaan masyarakat karena menentukan kemampuan orang untuk mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya. Peningkatan kualitas manusia dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan agar mereka lebih mandiri dan terampil. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat akan membuat mereka lebih berpengaruh dalam menentukan arah pembangunan, dengan melihat

manusia sebagai pelaku utama, bukan hanya penerima manfaat, maka pengembangan potensi mereka menjadi langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa infrastruktur fisik sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran aktivitas pemberdayaan masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik mempercepat penyebaran pengetahuan, meningkatkan mobilitas, serta memperluas peluang ekonomi masyarakat. Dalam konteks modern, teknologi informasi dan komunikasi semakin memegang peran penting, dengan dukungan infrastruktur yang memadai akan memperkuat upaya pemberdayaan, dan membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan serta kesejahteraan jangka panjang.

d. Keadaan Kelembagaan

Keberadaan lembaga memiliki peranan penting dalam mendorong proses pemberdayaan masyarakat, keberadaan lembaga berperan menyusun kebijakan, mengelola berbagai sumber daya, serta menyalurkan dana, layanan pendidikan, dan infrastruktur bagi masyarakat, seperti lembaga pelatihan membantu meningkatkan keterampilan individu, sedangkan lembaga yang bersifat demokratis memberikan ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Kerja sama antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat

sipil juga menciptakan sinergi yang mendukung pemberdayaan dari berbagai aspek.

e. Organisasi dan administrasi

Organisasi dan administrasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Keduanya menjadi dasar yang mengatur bagaimana tujuan, struktur, dan sumber daya dikelola. Organisasi memberikan kerangka yang jelas agar pengelolaan sumber daya lebih efektif, sedangkan administrasi membantu mengarahkan kegiatan agar sesuai dengan tujuan pemberdayaan. Selain itu, organisasi dan administrasi juga berperan dalam mengatur pembagian sumber daya, menjaga komunikasi yang baik, membangun budaya kerja yang positif, serta mengembangkan kemampuan sumber daya manusia.

f. Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah maupun lembaga terkait merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemberdayaan masyarakat, melalui kebijakan, pemerintah dapat menghadirkan regulasi, program, pendanaan, serta fasilitas yang mempermudah masyarakat memperoleh akses sumber daya dan terlibat dalam pembangunan. Kebijakan juga berfungsi sebagai panduan dan kerangka kerja untuk mendukung lahirnya partisipasi serta inisiatif masyarakat, dengan dukungan kebijakan yang tepat, masyarakat akan memiliki ruang untuk berkembang sekaligus memperoleh fondasi yang kuat bagi pertumbuhan berkelanjutan

1.6.5 Desa Wisata

Dalam peraturan Menteri kebudayaan dan Pariwisata tahun 2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata, desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antar atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai komponen, kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan minuman, cinderamata dan kebutuhan sosial wisata lainnya.

Menurut Hadiwijoyo (2018) mendefinisikan desa wisata ialah kawasan pedesaan yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, kehidupan sehari-hari serta memiliki tata ruang yang khas sehingga mempunyai potensi untuk dikembangkannya kepariwisataan. Menurut Priasukmana dan Mulyadin (2013), desa wisata adalah kawasan pedesaan yang memberikan suasana holistik yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik dalam aspek sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, maupun kehidupan sehari-hari (Boediono, 2002). Desa wisata juga memiliki keunikan arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang unik dan menarik, serta kegiatan ekonomi dengan karakteristik khas. Selain itu, desa wisata memungkinkan pengembangan berbagai elemen pariwisata seperti destinasi, akomodasi, dan kebutuhan wisata lainnya.

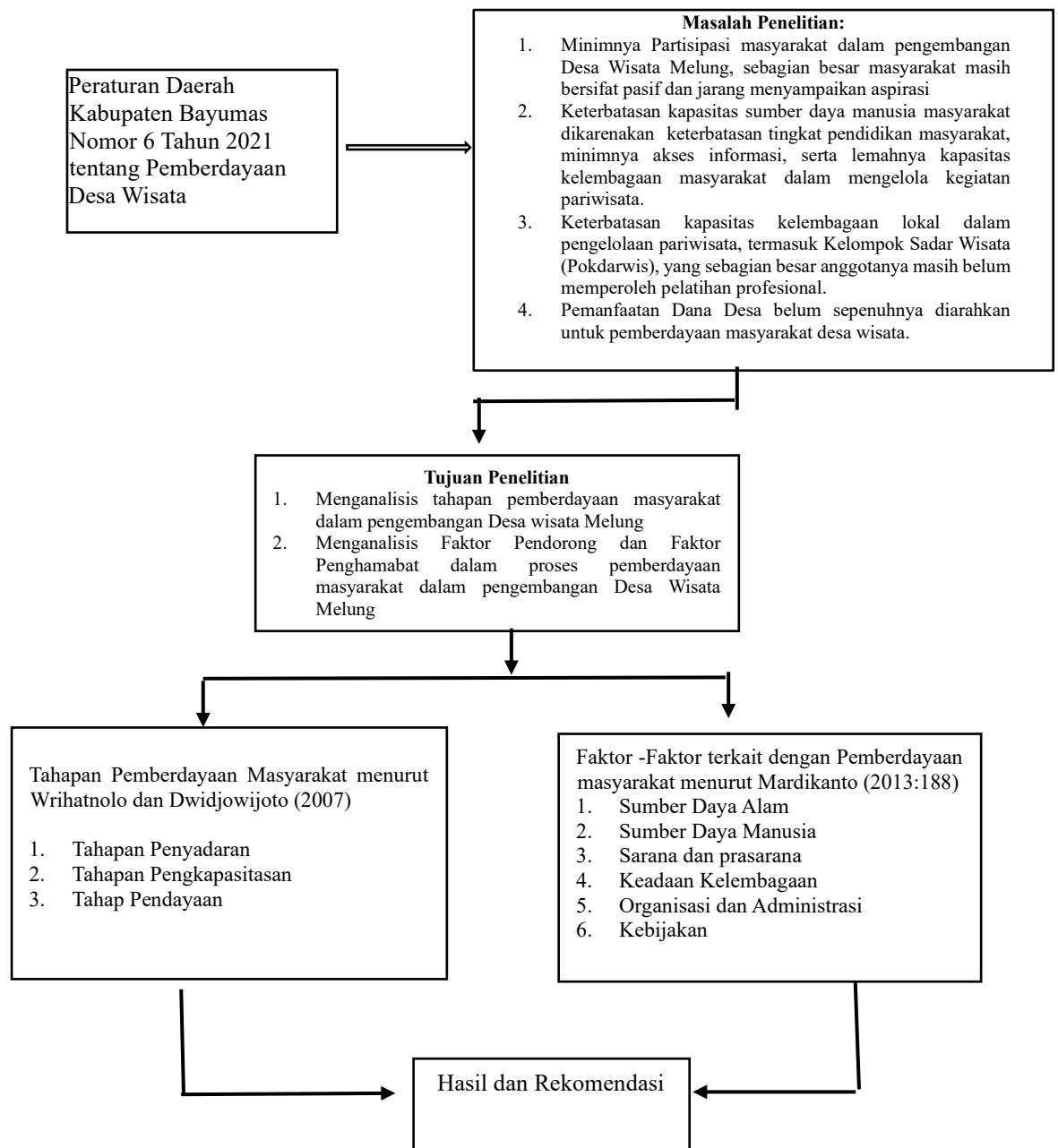
Desa wisata mampu mengurangi urbanisasi masyarakat dari desa ke kota karena banyak aktivitas ekonomi di desa yang dapat diciptakan. Selain itu juga, desa wisata dapat menjadi upaya untuk melestarikan dan memberdayakan potensi budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang ada di masyarakat. Terdapat jenis- jenis desa wisata yang dapat menjadi acuan, antara lain (Vitria, 2015) :

- a. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam yaitu desa wisata yang menjadikan kondisi alam sebagai daya tarik utama seperti pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam yang unik
- b. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal yaitu desa wisata yang menjadikan keunikan adat tradisi dan kehidupan keseharian masyarakat menjadi daya tarik utama seperti aktivitas mata pencaharian, religi maupun bentuk aktifitas lainnya. Desa wisata kreatif yaitu desa wisata yang menjadikan keunikan aktifitas ekonomi kreatif dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kerajinan, maupun aktivitas kesenian yang khas menjadi daya Tarik
- c. Desa wisata berbasis kombinasi merupakan desa wisata yang mengombinasikan antara satu atau lebih daya tarik wisata yang dimiliki seperti alam, budaya dan kreatif

Desa wisata pada hakikatnya bukan hanya sekadar destinasi wisata, melainkan juga sebuah instrumen pemberdayaan masyarakat pedesaan yang mampu menggerakkan sektor ekonomi lokal, melestarikan budaya, serta

menjaga kelestarian lingkungan. Keberadaan desa wisata diharapkan dapat menciptakan kemandirian masyarakat melalui pengelolaan potensi alam, budaya, dan kreativitas yang dimiliki, sehingga tercipta kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata harus dilakukan secara terencana, partisipatif, dan berkelanjutan.

1.6.6 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, (2025)

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah suatu proses untuk menerjemahkan konsep yang bersifat abstrak menjadi bentuk yang lebih konkret, terukur, dan dapat diamati sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis (Sugiyono, 2019). Dengan demikian, operasionalisasi konsep memegang peranan penting dalam menjembatani teori dan realitas lapangan, karena melalui proses ini suatu fenomena dapat dijabarkan ke dalam indikator-indikator yang jelas dan sistematis (Sugiyono, 2018).

Dalam penelitian ini, operasionalisasi konsep digunakan untuk menganalisis proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya meningkatkan partisipasi, kapasitas, dan kemandirian masyarakat desa yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

Tahap Penyadaran (*conscientization*), meliputi kegiatan identifikasi permasalahan yang dihadapi desa, pemberian motivasi dan pendampingan, serta sosialisasi program pemberdayaan melalui diskusi kelompok dan penyampaian informasi mengenai hak maupun peluang masyarakat. Tahap Pengkapasitasan (*capacity building*), berfokus pada pengembangan kemampuan masyarakat, pemerintah desa, dan sistem kelembagaan agar mampu mengelola potensi desa wisata secara mandiri. Tahap Penguatan (*empowerment*), merupakan penerapan nyata pemberdayaan melalui partisipasi aktif masyarakat, peningkatan

keterampilan dan pengetahuan, akses terhadap sumber daya, serta evaluasi diri terhadap keberhasilan program.

Namun, proses pemberdayaan masyarakat tidak selalu berjalan tanpa hambatan, beberapa kendala yang kerap muncul di lapangan oleh karena itu, operasionalisasi konsep dalam penelitian ini menjadi instrumen penting untuk menjabarkan dinamika pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Melung secara terukur dan komprehensif, sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat keberhasilan program. Untuk memperoleh batasan yang jelas, penulis menyederhanakan pemikiran mengenai permasalahan yang akan diteliti melalui operasionalisasi konsep berikut:

Tabel 1. 3 Fenomena Penelitian

No.	Fokus Penelitian	Fenomena	Gejala
1.	Proses Pemberdayaan Masyarakat	Tahap Penyadaran	1..Adanya identifikasi potensi dan permasalahan di Desa Wisata Melung 2. Adanya Proses pemberian motivasi dan pendampingan kepada masyarakat 3. Adanya Sosialisasi program pemberdayaan, diskusi kelompok, atau penyampaian informasi 4. Adanya Proses perekrutan peserta Program Pemberdayaan
		Tahap Pengkapasitasan	1. Adanya kegiatan lokal karya atau kegiatan lain untuk meningkatkan kemampuan teknis Pokdarwis 2. Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan desa wisata Melung

			3. Adanya Kegiatan Kapasitas lembaga lokal Pokdarwis dan BUMDES
		Tahap Pendayaan	1. Adanya Partisipasi aktif masyarakat dalam program pemberdayaan Pokdarwis 2. Adanya dukungan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat 3. Adanya Evaluasi terhadap hasil dan keberhasilan program
2	Faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Melung	Sumber Daya Alam	1. Adanya Potensi Sumber Daya Alam di Desa Wisata Melung 2. Adanya pemberdayaan masyarakat lokal yang mendukung pengelolaan sumber daya alam
		Sumber Daya Manusia	1. Adanya program pelatihan, atau pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat 2. Adanya dampak partisipasi aktif masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat 3. Adanya Kemampuan masyarakat memanfaatkan potensi lokal secara kreatif dan produktif.
		Sarana dan Prasarana	1. Adanya ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Melung 2. Adanya inisiatif pembaruan sarana dan prsarana di Desa wisata Melung 3. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung

			kegiatan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat
		Keadaan Kelembagaan	1. Adanya Ketersediaan Lembaga Pendukung Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Melung 2. Adanya Kerja Sama antar pihak (Pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Melung
		Organisasi dan Administrasi	1. Adanya struktur organisasi Pokdarwis dan BUMDes yang jelas dan berfungsi efektif dalam mengelola Desa Wisata Melung 2. Tersedianya sistem administrasi pokdarwis dan Bumdes yang rapi dan teratur untuk mendukung pengelolaan serta pemberdayaan Desa Wisata Melung
		Kebijakan	1. Tersedianya Kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 2. Adanya dampak nyata yang dirasakan masyarakat akibat penerapan kebijakan tersebut

1.8 Argumen Penelitian

Pengembangan Desa Wisata Melung di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas SDM dan kelembagaan lokal, hingga minimnya dukungan optimal dari pemerintah desa, pemerintah daerah, dan LSM. Kondisi ini menunjukkan bahwa tahapan pemberdayaan masyarakat belum berjalan

secara efektif, padahal pemberdayaan menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan desa wisata yang mandiri dan berkelanjutan. Penelitian ini penting dilakukan karena pemberdayaan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pengembangan desa wisata.

Dengan menggunakan tahapan pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowiyoto (2007) yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan penelitian ini dapat memetakan sejauh mana masyarakat telah diberi pemahaman, dibekali keterampilan, dan didorong untuk memanfaatkan potensi desa wisata. Analisis ini juga akan mengungkap faktor pendorong dan faktor penghambat, yang memengaruhi efektivitas pemberdayaan. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi aktual pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Melung serta menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah, Pokdarwis, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kolaborasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas masyarakat agar pengembangan desa wisata dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif di mana menurut Moeleong (2018) yaitu kajian yang dilakukan secara deskriptif atau menggambarkan setiap data yang didapat dengan dasar informasi yang peneliti peroleh untuk kemudian diuraikan dalam analisis permasalahan mengenai analisis proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memiliki lokasi di Desa Wisata Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Alasan dipilihnya lokasi ini adalah meskipun memiliki potensi alam dan budaya yang besar desa wisata ini masih menghadapi sejumlah permasalahan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain minimnya partisipasi sebagian masyarakat dalam pengelolaan wisata, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia Pokdarwis yang sebagian besar bekerja secara sukarela tanpa pelatihan profesional, serta kurang optimalnya dukungan kelembagaan. Kondisi ini menjadikan Desa Wisata Melung sebagai lokasi yang tepat untuk diteliti, karena dapat menggambarkan dinamika sekaligus tantangan nyata dalam upaya pemberdayaan masyarakat pada pengembangan desa wisata.

1.9.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi purposive sampling dalam pemilihan informan, yang berarti peneliti mempertimbangkan faktor-faktor tertentu saat memilih informan penelitian (Saebani, 2019). Tujuannya adalah untuk melakukan identifikasi terhadap informan yang mengetahui dengan pasti mengenai perkembangan Desa Wisata Melung. Berikut adalah informan pada penelitian ini:

Tabel 1. 4 Informan Penelitian

No	INFORMAN	JUMLAH INFORMASI
1.	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	1
2.	Kepala Desa Melung	1
3.	Pokdarwis Desa Melung	1
4.	Ketua BUMDES Desa Melung	1
5.	Masyarakat Desa Melung	1

1.9.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis data kualitatif, yang digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial dan juga melakukan identifikasi terkait hal tersebut. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk deskripsi dan bukan merupakan data numerik. Data tersebut didapatkan dari beberapa sumber seperti studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara (Semiawan, 2015).

1.9.5. Sumber Data

Sumber data merupakan data-data yang perolehannya didasarkan dari beberapa hal. Sumber ini penting didapatkan karena terkait dengan penelitian yang biasanya terdiri dari data primer dan data sekunder. (Sugiyono, 2014). Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu berupa wawancara dan observasi terhadap objek penelitian, peneliti ini juga menggunakan data sekunder berupa jurnal, artikel, data dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Banyumas.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah serangkaian langkah-langkah yang dilalui peneliti untuk memperoleh/mengumpulkan data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data dalam rencana penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, berikut uraiannya: (Saebani, 2019)

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik (cara) yang pertama kali digunakan dalam penelitian ilmiah. Observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung ke objek penelitian yaitu di Desa Wisata Melung,

Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, yang dilakukan dengan sistematis terhadap aspek yang diteliti terkait analisis proses pemberdayaan masyarakat.

2. Wawancara

Proses wawancara ini dilakukan terhadap para narasumber atau informan yaitu ada 5 informan seperti yang telah diuraikan pada subjek penelitian diantaranya Dinas Pemdua Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, Kepala desa Melung, Pokdarwis Desa Melung, Ketua BumDes Desa Melung dan Masyarakat Desa Melung.

3. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan sebagai instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dikumpulkan berupa gambar-gambar yang diambil pada saat observasi dan wawancara. Peneliti akan mengumpulkan informasi dapat berupa catatan atau tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang tahaapan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Melung.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Pada sebuah penelitian, diperlukan adanya analisis data yang berfungsi untuk melakukan pencarian dan juga penyesuaian data yang perolehannya didasarkan pada wawancara atau observasi di lapangan. Proses analisis dalam penelitian model ini dilakukan dengan 4 tahap, yaitu:(Suryana, 2015).

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari 2 bagian yaitu deskriptif

dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Kondensasi Data

Pada proses reduksi data, peneliti akan menggunakan keyword berdasarkan pada operasionalisasi konsep tentang proses pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses penyadaran, pengkapasitasan dan proses pendayaan serta faktor pendorong dan faktor penghambat apa saja yang berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan di Desa Wisata Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

3. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif melalui hasil transkrip wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh di lapangan. Data disajikan dalam bentuk narasi agar memudahkan pemahaman terhadap proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Melung. Hasil wawancara disusun berdasarkan tema-tema utama sesuai fokus penelitian, seperti tahapan pemberdayaan, peran masyarakat, serta faktor penghambat. Dengan penyajian ini, peneliti dapat menampilkan gambaran yang jelas dan runtut mengenai kondisi serta dinamika pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Melung.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan melalui proses analisis terhadap pola dan kecenderungan yang muncul dari data hasil wawancara. Peneliti mengamati tren yang terbentuk dari temuan lapangan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, hasil temuan tersebut didiskusikan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang menjadi landasan konseptual penelitian ini, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual. Melalui proses interpretasi dan perbandingan antara data empiris dan teori, peneliti berupaya menemukan kesesuaian maupun perbedaan yang dapat menjelaskan dinamika proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Melung.

1.9.8. Kualitas dan Keabsahan Data

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri (*key instrument*). Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber, dimana dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.